



TATA KELOLA DESA MEKARSARI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAJINAN BAMBU BERBASIS CONTINUOUS IMPROVEMENT DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DESA

^{1*} Lukman Nulmunir, ² Yusup Musyaffa, ³ Gugun Geusan Akbar, ⁴ Ike kania
^{1,2,3,4} Universitas Garut

*Corresponding Email: ¹ 24094125004@pasca.uniga.ac.id, ² yusufmusyaffa@gmail.com, ³ gugun.geusanakbar@uniga.ac.id, ⁴ ikeukania@fisip.uniga.ac.id

Riwayat Artikel

Dikirim: 29-06-2026

Direvisi: : 29-06-2026

Diterima: : 29-06-2026

Abstract

Village economic development is a strategic effort to improve community welfare by utilizing local potential. Mekarsari Village has the potential to develop bamboo crafts as a basis for the village's creative economy, but its development still faces various obstacles, such as limited village governance, weak development administration, and low-quality production and marketing systems. This study aims to analyze the role of village governance, the application of the concept of continuous improvement, and village development administration in supporting the development of the bamboo craft economy in Mekarsari Village. The study used a descriptive qualitative approach with a case study method. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and documentation. The results indicate that the implementation of continuous improvement contributes to improving product quality, encouraging design innovation, and strengthening community business institutions. Furthermore, integrated village development administration through planning, budgeting, and monitoring can support the sustainability of village economic development programs. The synergy between good village governance, continuous improvement, and effective development administration has the potential to strengthen bamboo craft development and enhance local economic resilience in a sustainable manner.

Keywords: Village Governance, Bamboo Crafts, Continuous Improvement, Development Administration, Village Economy.

Abstrak

Pembangunan ekonomi desa merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Desa Mekarsari memiliki potensi kerajinan bambu sebagai basis ekonomi kreatif desa, namun pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tata kelola desa, lemahnya administrasi pembangunan, serta rendahnya kualitas produksi dan sistem pemasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tata kelola desa, penerapan konsep continuous improvement, dan administrasi pembangunan desa dalam mendukung pengembangan ekonomi kerajinan bambu di Desa Mekarsari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan continuous improvement berkontribusi dalam meningkatkan kualitas produk, mendorong inovasi desain, serta memperkuat kelembagaan usaha masyarakat. Selain itu, administrasi pembangunan desa yang terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, dan monitoring mampu mendukung keberlanjutan program pengembangan ekonomi desa. Sinergi antara tata kelola desa yang baik, continuous improvement, dan administrasi pembangunan yang efektif berpotensi memperkuat pengembangan kerajinan bambu serta meningkatkan ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Kata kunci: Tata Kelola Desa, Kerajinan Bambu, Continuous Improvement, Administrasi Pembangunan, Ekonomi Desa.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya serta menentukan arah pembangunan wilayahnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (Republik Indonesia, 2014). Seiring dengan meningkatnya kewenangan tersebut, penerapan prinsip *good village governance* menjadi semakin penting, terutama melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat (Angkasa, 2024).

Salah satu strategi utama dalam pembangunan desa adalah penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi kreatif yang menekankan peran kreativitas masyarakat, kearifan lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah (Purnomo, 2016). Desa Mekarsari merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi kreatif berbasis kerajinan bambu. Ketersediaan bahan baku bambu yang melimpah serta keterampilan masyarakat dalam mengolahnya menjadikan sektor ini berpotensi besar sebagai sumber penggerak ekonomi desa. Selain memiliki nilai ekonomi, industri kerajinan bambu juga bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Nasrif, 2024).

Namun, pengembangan kerajinan bambu di Desa Mekarsari masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengelolaan usaha yang masih bersifat tradisional, kualitas produk yang belum konsisten, serta keterbatasan akses pemasaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi desa memerlukan dukungan tata kelola desa yang efektif serta administrasi pembangunan yang terintegrasi agar program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan (Suryawati et al., 2022). Dalam konteks ini, pendekatan *continuous improvement* menjadi strategi yang relevan karena menekankan proses perbaikan berkelanjutan dalam aspek produksi, manajemen usaha, dan pengendalian kualitas guna meningkatkan daya saing produk. Integrasi antara tata kelola desa yang baik, administrasi pembangunan desa, dan penerapan *continuous improvement* diharapkan mampu memperkuat pengembangan ekonomi kerajinan bambu serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Meitasari et al., 2026).

2. KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA/HIPOTESIS

Tata kelola desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan lokal yang berfungsi mengatur proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan di tingkat desa. Konsep ini berakar pada prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Angkasa, 2024). Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan prinsip tersebut dikenal sebagai *good village governance*, yang menekankan penguatan

kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa (Aldi et al., 2024). Prinsip transparansi berperan dalam meningkatkan keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran, sedangkan partisipasi masyarakat memungkinkan keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan sehingga program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Suryawati et al., 2022; Herlina et al., 2019).

Administrasi pembangunan desa merupakan proses pengelolaan kebijakan, sumber daya, dan program pembangunan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien (Arifah et al., 2022). Administrasi pembangunan mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diwujudkan melalui penyusunan dokumen seperti RPJMDes dan RKPDes yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa baik dalam jangka menengah maupun tahunan (Republik Indonesia, 2014). Administrasi pembangunan yang tertib memungkinkan terciptanya koordinasi antara pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal secara terintegrasi (Aldi et al., 2024).

Selain tata kelola dan administrasi pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat juga memerlukan pendekatan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya saing usaha. Konsep continuous improvement merupakan pendekatan manajemen yang menekankan proses perbaikan secara berkelanjutan dalam aspek produksi, manajemen usaha, dan kualitas produk melalui evaluasi serta inovasi yang berkesinambungan (Meitasari et al., 2026). Salah satu metode yang sering digunakan adalah siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang memungkinkan pelaku usaha melakukan evaluasi dan perbaikan secara sistematis dalam proses produksi (Vera, 2016). Dalam konteks UMKM desa, penerapan continuous improvement dapat meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, serta kemampuan usaha dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar, termasuk dalam pengembangan industri kerajinan bambu yang berbasis potensi lokal (Amalinda & Hidayah, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik tata kelola desa dan pengembangan ekonomi kerajinan bambu di Desa Mekarsari. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena secara komprehensif sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive karena Desa Mekarsari memiliki potensi ekonomi kreatif berbasis kerajinan bambu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan aparatur pemerintah desa, pengrajin bambu, pengelola BUMDes, serta tokoh masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam pengembangan ekonomi desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap dokumen desa seperti RPJMDes, RKPDes, serta laporan kegiatan BUMDes. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 2014).

4. PEMBAHASAN

Desa Mekarsari merupakan wilayah pedesaan yang memiliki kondisi geografis berupa dataran rendah hingga perbukitan ringan dengan lingkungan yang relatif subur. Ketersediaan sumber daya alam, khususnya tanaman bambu, menjadi potensi penting dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Secara sosial ekonomi, sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian, buruh harian, serta usaha mikro dan kecil. Dalam konteks tersebut, kerajinan bambu berkembang sebagai salah satu aktivitas ekonomi masyarakat yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama maupun tambahan bagi sebagian warga desa. Produk kerajinan bambu yang dihasilkan meliputi berbagai peralatan rumah tangga, anyaman, perabot sederhana, serta produk dekoratif. Namun demikian, pemanfaatan potensi bambu di Desa Mekarsari masih belum optimal, terutama dalam aspek diversifikasi produk, inovasi desain, serta pengembangan jaringan pemasaran.

Tata kelola Desa Mekarsari dijalankan melalui struktur kelembagaan yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga kemasyarakatan desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah desa berperan dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan pembangunan, serta fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Proses pengambilan keputusan pembangunan desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, serta unsur masyarakat. Namun demikian, keterlibatan kelompok pengrajin bambu dalam proses perencanaan pembangunan desa masih belum optimal sehingga aspirasi pelaku usaha belum sepenuhnya terakomodasi dalam program pembangunan ekonomi desa.

Produksi kerajinan bambu di Desa Mekarsari masih didominasi oleh metode produksi tradisional yang mengandalkan keterampilan turun-temurun masyarakat. Proses produksi meliputi pemilihan bahan baku, pemotongan, perakitan, hingga finishing yang sebagian besar dilakukan secara manual, sehingga kapasitas produksi relatif terbatas dan kualitas produk belum seragam. Selain itu, sistem pemasaran masih dilakukan secara konvensional melalui penjualan langsung maupun perantara lokal, sementara pemanfaatan teknologi digital masih sangat terbatas. Upaya penerapan konsep continuous improvement mulai dilakukan melalui peningkatan kualitas bahan baku dan ketelitian dalam proses produksi, meskipun standar mutu yang terstruktur belum tersedia. Administrasi pembangunan desa telah mendukung pengembangan ekonomi kerajinan bambu melalui penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes, namun sektor kerajinan bambu belum menjadi prioritas utama pembangunan desa sehingga dukungan anggaran, program pendampingan, serta evaluasi dampak ekonomi masih terbatas.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Mekarsari memiliki potensi ekonomi lokal yang signifikan melalui pengembangan kerajinan bambu yang didukung oleh ketersediaan bahan baku dan keterampilan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam dan kreativitas masyarakat sebagai penggerak pembangunan ekonomi desa (Purnomo, 2016; Herlina et al., 2019). Dari perspektif tata kelola, mekanisme musyawarah desa mencerminkan penerapan prinsip good village governance yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pembangunan desa (Angkasa, 2024). Keterlibatan pelaku usaha kerajinan bambu dalam proses perencanaan pembangunan masih perlu diperkuat. Selain itu, praktik produksi yang masih

tradisional menunjukkan keterbatasan dalam teknologi, inovasi produk, dan akses pasar, sebagaimana umum terjadi pada UMKM berbasis kerajinan (Vera, 2016; Amalinda & Hidayah, 2024). Oleh karena itu, penerapan continuous improvement menjadi pendekatan strategis untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, serta daya saing usaha kerajinan bambu melalui proses perbaikan berkelanjutan yang didukung oleh tata kelola desa dan administrasi pembangunan yang efektif (Meitasari et al., 2026).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Mekarsari memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar melalui pengembangan kerajinan bambu yang didukung oleh ketersediaan bahan baku serta keterampilan masyarakat dalam proses produksi. Namun demikian, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti proses produksi yang masih tradisional, keterbatasan inovasi produk, serta sistem pemasaran yang terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta strategi pengembangan ekonomi lokal yang lebih terintegrasi guna meningkatkan daya saing produk kerajinan bambu.

Selain itu, tata kelola Desa Mekarsari telah mengarah pada penerapan prinsip good village governance, terutama melalui mekanisme musyawarah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Meskipun demikian, keterlibatan pelaku usaha kerajinan bambu dalam proses perencanaan pembangunan desa masih perlu diperkuat. Secara keseluruhan, pengembangan ekonomi kerajinan bambu memerlukan sinergi antara tata kelola desa yang baik, administrasi pembangunan desa yang efektif, serta penerapan konsep continuous improvement dalam kegiatan usaha masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat keberlanjutan ekonomi lokal.

6. REFERENSI

Aldi, A., Santoso, S., & Prasetyo, E. (2024). Peningkatan kualitas tata kelola dalam pengelolaan dana desa di Desa Buaran Bambu Kabupaten Tangerang. *Innovative: Journal of Social Sciences*, 4(2), 155–167.

<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15037>

Amalinda, F., & Hidayah, A. A. (2024). Pengembangan UMKM kerajinan bambu sebagai upaya peningkatan pendapatan desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 201–210.

<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4317>

Angkasa, N. (2024). Smart village sebagai bentuk good village governance menuju era desa digital. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum dan Administrasi Publik*, 3(1), 45–58.

<http://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/2779>

Arifah, S., Prihastiwati, D. A., & Ratnasari, E. D. (2022). Tren riset UMKM dan ekonomi kreatif berbasis desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1–12.

<https://jdih.untidar.ac.id/produk-hukum/file/492035700a9a55d1f06495adef7333e1.pdf>

Herlina, E., Syarifudin, D., & Yulia, L. (2019). Pemetaan ekonomi kreatif dalam perspektif pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Sosiohumaniora*, 21(3), 310–320.

<http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/730>

Meitasari, D., Rayesa, N. F., Prasetyaningrum, D. I., & Dewi, H. E. (2026). Continuous improvement dalam pengembangan ekonomi kreatif desa. *Journal of Rural Development Studies*, 8(1), 1–15.

<https://books.google.com/books?id=lxCuEQAAQBAJ>

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Nasrif, A. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif kerajinan bambu di Desa Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit. *Repository UIN Raden Intan Lampung*.

<https://repository.radenintan.ac.id/36425>

Purnomo, R. A. (2016). Ekonomi kreatif: Pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 85–97.

<https://eprints.umpo.ac.id/2859>

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Suryawati, B. N., Abidin, Z., & Muttaqillah, M. (2022). Tata kelola organisasi untuk pengembangan usaha kerajinan bambu di desa. *Jurnal Pepadu*, 4(1), 45–56.